



Efektivitas Pengendalian Internal Verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales terhadap Ketepatan Pembayaran Di PT Semen Gresik Rembang

Zumrotus Sa'idah¹, Firdha Rahmiyanti², Yuni Aisyah³, Siti Karimah⁴, Dava Nur Azizah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Received : 21 Mei 2026, Revised : 30 Mei 2026, Published : 12 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Zumrotus Sa'idah

E-mail: zumrotussaidah713@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal melalui mekanisme verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales dalam mendukung ketepatan pembayaran pada PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan magang pada unit Accounting & Finance, wawancara dengan verifikasi internal, serta analisis dokumentasi DOP Sales periode Januari–Maret 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dokumen berperan sebagai aktivitas pengendalian yang mampu mendeteksi kesalahan administratif sebelum transaksi diproses dalam sistem keuangan perusahaan. Dari total 270 dokumen DOP Sales yang diajukan, sebanyak 41 dokumen atau sekitar 15,2% mengalami revisi akibat ketidaksesuaian nominal transaksi, kesalahan perpajakan, ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta kesalahan administratif lainnya. Revisi dokumen berdampak pada tertundanya proses pembayaran, potensi keterlambatan kepatuhan perpajakan, serta risiko keterlambatan pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi perusahaan. Meskipun mekanisme verifikasi telah berjalan sesuai prosedur, efektivitas pengendalian masih cenderung bersifat detektif karena kesalahan dokumen sebagian bersifat berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kontrol administratif pada tahap awal pengajuan dokumen, peningkatan komunikasi administratif, serta standarisasi format dokumen pembayaran untuk meningkatkan efisiensi verifikasi dan mendukung ketepatan pembayaran.

Kata kunci – dokumen pembayaran, ketepatan pembayaran, pengendalian internal, verifikasi dokumen, DOP sales

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of internal control through the verification mechanism of Sales Operational Payment Documents (DOP Sales) in supporting payment timeliness at PT Semen Gresik Rembang Plant. This research applies a qualitative approach using a case study method. Data were collected through direct observation during an internship in the Accounting & Finance unit, interviews with internal verifiers, and documentation analysis of Sales DOP records from January to March 2026. The results show that the document verification process functions as a control activity that detects administrative errors before transactions are processed in the company's financial system. Out of 270 submitted DOP Sales documents, 41 documents (15.2%) required revision due to discrepancies in transaction amounts, tax-related errors, incomplete supporting documents, and other administrative mistakes. Document revisions cause delays in the payment process, potential

tax compliance issues, and risks related to delayed accounting record recognition. Although the verification mechanism has been implemented according to procedures, the effectiveness of internal control tends to be detective in nature because similar document errors repeatedly occur. Therefore, strengthening administrative controls at the initial document submission stage, improving administrative communication, and standardizing payment document formats are necessary to enhance verification efficiency and support payment timeliness.

Keywords - document verification, internal control, payment timeliness, sales DOP, payment documents

How To Cite : Sa'idah, Z., Rahmiyanti, F., Aisyah, Y., Karimah, S., & Azizah, D. N. (2026). Efektivitas Pengendalian Internal Verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales terhadap Ketepatan Pembayaran Di PT Semen Gresik Rembang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 3(1), 29–43. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i1.866>

Copyright ©2026 Zumrotus Sa'idah, Firdha Rahmiyanti, Yuni Aisyah, Siti Karimah, Dava Nur Azizah

PENDAHULUAN

Ketepatan realisasi pembayaran kepada Unit Kerja Peminta (UKP) merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang merefleksikan kualitas governance suatu perusahaan. Dalam aktivitas operasional perusahaan manufaktur berskala besar, mekanisme pembayaran kepada UKP tidak terlepas dari serangkaian tahapan administratif yang rumit, dimulai dari proses pengajuan dokumentasi, pemeriksaan kelengkapan berkas, hingga pemberian otorisasi pembayaran. Akan tetapi, kerumitan prosedur tersebut sering kali menjadi pemicu inefisiensi ketika dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan, sehingga membutuhkan perbaikan berulang yang pada akhirnya memperlambat siklus penyelesaian pembayaran. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara rancangan prosedur pengendalian yang telah disusun dengan pelaksanaannya dalam praktik operasional keseharian.

Dalam konteks bisnis kontemporer yang ditandai oleh kompleksitas transaksi yang tinggi serta keterlibatan berbagai pihak eksternal, sistem pengendalian internal memiliki peran krusial dalam menjamin keandalan proses keuangan perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, khususnya terkait keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Siska Herlita & Bunga Indah Bayunitri, 2021).

Fungsi pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk menekan risiko kesalahan, mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan, serta memastikan setiap transaksi terlaksana secara sah, akurat, dan tepat waktu (Dewi et al., 2025). Berdasarkan kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), aktivitas pengendalian (*control activities*) menjadi komponen fundamental yang menjamin konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam siklus pengeluaran dan pembayaran kepada UKP (Nurhidayanti, 2025).

Salah satu bentuk konkret penerapan aktivitas pengendalian dalam siklus pengeluaran adalah pelaksanaan prosedur verifikasi dokumen sebelum otorisasi pembayaran dilakukan. Pada perusahaan manufaktur berskala besar, seperti PT Semen Gresik Pabrik Rembang, mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga dilaksanakan melalui sistem Dokumen Operasional Pembayaran (DOP). DOP Sales berfungsi sebagai instrumen administratif yang menjadi dasar legal dan operasional bagi pengajuan serta realisasi pembayaran atas transaksi eksternal. Tahapan verifikasi terhadap DOP Sales mencakup evaluasi kelengkapan dokumen pendukung, penilaian kesesuaian nilai transaksi dengan kontrak atau *purchase order*, pengujian validitas faktur pajak, pemeriksaan konsistensi tanggal dokumen, serta penilaian kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku (Nathasya, 2022). Secara konseptual, prosedur ini dirancang sebagai mekanisme preventif untuk mengurangi risiko kesalahan pembayaran

sekaligus menjamin akurasi dan ketepatan pelaksanaan proses pembayaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Namun demikian, tingkat efektivitas suatu sistem pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur yang terdokumentasi secara formal, melainkan oleh sejauh mana prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik operasional sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan program magang di Unit Accounting & Finance pada bagian verifikasi internal, ditemukan adanya frekuensi revisi dokumen DOP Sales yang relatif tinggi. Berdasarkan pencatatan dalam daftar monitoring menggunakan aplikasi Excel selama periode observasi (Januari-Maret 2026), dari total 270 dokumen DOP Sales yang diajukan untuk proses verifikasi, sebanyak 41 dokumen atau sekitar 15,2% mengalami revisi akibat ketidaksesuaian administratif. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa hampir 1 dari setiap 7 dokumen yang diajukan oleh UKP memerlukan koreksi sebelum dapat diproses lebih lanjut.

Jenis ketidaksesuaian yang paling sering ditemukan mencakup perbedaan nilai antara invoice dan dokumen pendukung, ketidaklengkapan maupun kesalahan dalam pengisian faktur pajak, ketidaksesuaian tanggal antara invoice dan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan ketentuan administratif perusahaan. Dari keseluruhan dokumen yang mengalami revisi, sebesar 29,3% disebabkan oleh ketidaksesuaian nominal antara dokumen rekapitulasi dan nota transaksi, 12,2% berkaitan dengan kesalahan perpajakan, dan 41,5% diakibatkan oleh ketidaklengkapan dokumen pendukung. Sementara itu, sekitar 17,1% revisi dokumen disebabkan oleh kesalahan administratif seperti penulisan judul dokumen, nomor invoice, dan penempatan tanda tangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan tersebut tidak bersifat insidental, melainkan muncul secara berulang sepanjang periode observasi.

Frekuensi revisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap panjangnya siklus pembayaran. Dokumen yang harus dikembalikan kepada pihak UKP untuk dilakukan perbaikan mengakibatkan penundaan proses pencatatan (*posting*) dalam sistem keuangan serta memperpanjang waktu tunggu hingga pembayaran dapat direalisasikan. Dalam perspektif manajemen hubungan dengan UKP, ketepatan waktu pembayaran merupakan indikator krusial dalam menjaga reputasi perusahaan sekaligus memastikan kelancaran kerja sama operasional (Hasan et al., 2024). Oleh karena itu, tingginya tingkat revisi terhadap DOP Sales menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengendalian internal melalui mekanisme verifikasi telah berjalan secara optimal.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap reliabilitas proses keuangan perusahaan. Agustin (2025) menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif mampu meningkatkan mutu pelaporan serta menekan risiko terjadinya kesalahan administratif. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan prosedur tertulis saja tidak memadai, melainkan diperlukan konsistensi implementasi serta pengawasan yang berkesinambungan agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Zahrani (2025) mengemukakan bahwa defisiensi pada fase verifikasi dokumen utang usaha berpotensi mengakibatkan penundaan pembayaran serta meningkatkan probabilitas kesalahan pencatatan transaksi. Temuan dari studi tersebut mengindikasikan bahwa fase verifikasi berkedudukan sebagai titik kritis dalam siklus pengeluaran yang memengaruhi tingkat akurasi dan ketepatan waktu realisasi pembayaran kepada UKP.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ningsih (2025) ditegaskan bahwa penerapan aktivitas pengendalian yang bersifat detektif yang hanya mampu mengidentifikasi kekeliruan setelah kejadian masih belum memadai untuk menekan frekuensi kesalahan administratif secara berkelanjutan. Riset tersebut menyoroti urgensi penguatan mekanisme kontrol preventif dalam tata kelola sistem verifikasi dokumen pembayaran untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak tahap awal proses. Selain itu dalam penelitian Sari (2025) mencatat bahwa kelemahan sistem pengendalian internal masih menjadi salah satu temuan dominan dalam pengelolaan belanja dan pembayaran, khususnya terkait ketidaksesuaian

dokumen dan ketidaktepatan administrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan administratif dalam proses pembayaran merupakan isu yang relevan secara nasional.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak mengkaji efektivitas pengendalian internal secara umum, kajian yang secara spesifik menganalisis mekanisme verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) sales dalam konteks perusahaan manufaktur semen di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada sektor perbankan, pemerintahan, atau perusahaan dagang, sehingga terdapat celah pengetahuan (*research gap*) mengenai bagaimana pengendalian internal melalui verifikasi dokumen pembayaran beroperasi dan berdampak pada ketepatan pembayaran di lingkungan industri manufaktur. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam proses verifikasi DOP Sales di PT Semen Gresik Pabrik Rembang sebagai representasi praktik tata kelola keuangan pada perusahaan manufaktur berskala besar.

Berdasarkan uraian permasalahan dan kajian pustaka tersebut, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal melalui verifikasi DOP Sales dalam mendukung ketepatan pembayaran kepada UKP sales & marketing di PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Secara lebih spesifik, penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa tingginya frekuensi revisi dokumen DOP Sales mengindikasikan belum optimalnya implementasi pengendalian internal pada tahap verifikasi, yang secara langsung berdampak pada ketepatan waktu dan akurasi proses pembayaran kepada UKP sales & marketing.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pengendalian internal pada siklus pengeluaran, serta kontribusi praktis bagi perusahaan dalam mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pembayaran kepada UKP sales & marketing.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Internal

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh personel organisasi guna memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan yang terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (COSO, 2013). Seiring perkembangannya, pandangan para akademisi semakin menegaskan bahwa pengendalian internal tidak hanya berperan sebagai instrumen kepatuhan administratif, melainkan juga sebagai mekanisme strategis yang berdampak langsung terhadap kinerja dan kesinambungan organisasi. Sejalan dengan itu, Zahara (2024) mengemukakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dipersiapkan dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas manajemen dan tata kelola untuk memberikan keyakinan rasional atas tercapainya tujuan entitas, yang meliputi jaminan atas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka kerja COSO (2013) menguraikan lima komponen pengendalian internal yang saling terintegrasi, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring activities*). Studi yang dilakukan oleh Otoo (2023) mengungkapkan bahwa dari kelima elemen tersebut, aktivitas pengendalian, lingkungan pengendalian, dan penilaian risiko merupakan prediktor terkuat yang secara signifikan memengaruhi efektivitas organisasi. Dengan menggunakan metode structural equation modeling pada sektor perbankan, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan aktivitas pengendalian yang konsisten memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran operasional. Dalam konteks PT Semen Gresik Pabrik Rembang, verifikasi terhadap Dokumen

Operasional Pembayaran (DOP) sales merupakan bentuk konkret dari aktivitas pengendalian

yang ditujukan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan internal sebelum diproses ke tahap persetujuan atau pembayaran.

Tingkat efektivitas sistem pengendalian internal sinergis, sehingga tujuan organisasi dapat diraih dengan tingkat keyakinan yang memadai. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2026) terkait penerapan pengendalian internal pada sektor manufaktur di Indonesia, dinyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif harus mampu membangun suatu sistem yang tidak hanya mencegah dan mendeteksi ketidakberesan secara dini, tetapi juga mendorong peningkatan efisiensi di setiap proses bisnis yang dijalankan. Lebih lanjut, temuan Arlinda (2025) membuktikan bahwa adopsi teknologi informasi yang terintegrasi secara signifikan memperkuat efektivitas pengendalian internal perusahaan, khususnya dalam hal kecepatan dan ketepatan pemrosesan dokumen transaksi keuangan. Adapun secara operasional, indikator efektivitas pengendalian internal dapat diidentifikasi melalui kelengkapan dan konsistensi prosedur yang diimplementasikan, tingkat ketaatan personel terhadap standar yang berlaku, serta kapasitas sistem dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi penyimpangan sebelum berdampak pada mekanisme pembayaran (Arista et al., 2023).

Verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales

Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) sales merupakan formulir pengajuan biaya operasional unit kerja, seperti penggunaan kendaraan dinas, konsumsi rapat, atau kebutuhan operasional lainnya. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban finansial yang diajukan UKP sales & marketing kepada bagian keuangan untuk mengganti atau membayar biaya kegiatan. Dalam sistem informasi akuntansi, DOP dikategorikan sebagai *source document* yang menjadi dasar pencatatan pengeluaran kas sekaligus bukti sah kewajiban pembayaran perusahaan. Zahara (2024) menegaskan bahwa kualitas dokumen sumber seperti DOP menentukan keandalan data keuangan, di mana kelemahan pada kelengkapan atau keabsahan dokumen berdampak langsung pada akurasi pencatatan dan ketepatan pembayaran.

PT Semen Gresik Pabrik Rembang, DOP terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan mekanisme pencairan. Yaitu Permintaan Uang Muka (PUM), Permintaan Pembayaran Langsung (PPL), Pertanggungjawaban Keuangan (PJK) atas UM. Pembagian ini sejalan dengan konsep siklus pengeluaran kas menurut Romney (2012) di mana setiap jalur pengeluaran memerlukan verifikasi dan otorisasi berbeda, namun tetap menuntut kelengkapan dokumen pendukung sebelum pembayaran diproses. Secara umum, proses verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales diawali dari pengajuan permintaan pembayaran oleh unit kerja sales & marketing melalui dokumen tagihan yang dapat berupa Permintaan Uang Muka (PUM), Permintaan Pembayaran Langsung (PPL), Pertanggungjawaban Keuangan (PJK) atas UM. Dokumen yang diajukan kemudian diterima oleh bagian verifikasi internal untuk dilakukan pencatatan tanggal penerimaan serta pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan kepada UKP sales & marketing untuk dilakukan revisi. Sebaliknya, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, berkas diteruskan kepada *Accounting Officer* untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan otorisasi. Selanjutnya dokumen diproses kembali oleh bagian verifikasi untuk dilakukan posting transaksi dalam *system SAP* serta pengecekan ketersediaan anggaran. Dokumen yang telah diposting kemudian dikirimkan kepada bendahara sebagai tahap akhir sebelum proses pembayaran direalisasikan. Struktur ini mencerminkan prinsip *layered control* menurut Salsabila (2025) di mana setiap lapisan verifikasi dirancang untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin lolos dari tahap sebelumnya.

Aspek kritis lain adalah verifikasi pajak, yang dilakukan dengan mengidentifikasi jenis transaksi dan *cost center* dari setiap dokumen. Satu berkas DOP dapat memuat lebih dari satu jenis PPh, seperti PPh Pasal 21, 22, dan 23, yang harus dihitung terpisah. Terdapat ketentuan khusus, misalnya

transaksi pada cost center jamuan tamu tidak dikenakan PPh meskipun termasuk objek pajak. Proses verifikasi pajak meliputi identifikasi nota, pengelompokan jenis PPh, perhitungan per objek, hingga penginputan ke sistem. Kompleksitas ini menegaskan pentingnya kompetensi verifikator dan standardisasi prosedur. Efektivitas pengendalian bergantung pada kejelasan standar dan kapabilitas personel dan juga menegaskan bahwa ketiadaan atau ketidakjelasan prosedur verifikasi dokumen merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan (Haqqe & Fatah, 2025).

Ketepatan Pembayaran

Ketepatan pembayaran dalam kerangka manajemen keuangan operasional meliputi dua aspek fundamental yang saling terkait, yaitu akurasi nominal (*accuracy of amount*) dan kesesuaian jadwal (*timeliness*). Akurasi nominal mengacu pada keselarasan antara jumlah yang dibayarkan dengan hak yang semestinya diterima berdasarkan perhitungan yang benar atas realisasi aktivitas, sedangkan kesesuaian jadwal merujuk pada penyelesaian pembayaran dalam periode yang telah ditetapkan oleh kebijakan korporasi. Wijayanto (2023) membuktikan bahwa determinan ketepatan waktu pada perusahaan manufaktur di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal yang diimplementasikan, di mana entitas dengan pengendalian internal yang lebih kokoh secara konsisten menunjukkan tingkat ketepatan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Kualitas dokumen pendukung yang diajukan serta efektivitas proses verifikasi turut menentukan tingkat ketepatan pembayaran. Fahira (2024) mengungkapkan bahwa defisiensi dalam proses verifikasi dokumen berakibat langsung pada ketidakakuratan pembayaran kepada UKP. Sementara itu, Wirdiansyah (2022) membuktikan bahwa penerapan prosedur verifikasi yang terstandarisasi secara signifikan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu realisasi pembayaran. Pada konteks Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) di PT Semen Gresik Pabrik Rembang, mekanisme penentuan status Pertanggungjawaban Keuangan (PJK) baik dalam kondisi impas, lebih bayar, ataupun kurang bayar menjadi indikator konkret yang merefleksikan tingkat ketepatan pembayaran sekaligus menjadi tolok ukur yang dapat dievaluasi sebagai luaran dari proses verifikasi yang dilaksanakan..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menerapkan strategi studi kasus di PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan riset untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif efektivitas pengendalian internal melalui mekanisme verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) sales, yang tidak dapat diungkap secara memadai hanya dengan pendekatan kuantitatif. Sukmana (2025) menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi yang relevan ketika peneliti hendak mengeksplorasi fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tegas. Penentuan informan dilakukan secara purposif, dengan melibatkan staf verifikator internal yang secara langsung mengelola proses verifikasi DOP sales dalam kesehariannya, sebagai individu yang memiliki pemahaman operasional paling mendalam terhadap objek kajian. Teknik purposif ini tidak diarahkan untuk mencapai representasi statistik, melainkan untuk menggali pemahaman yang mendalam dan kaya terhadap sistem verifikasi yang diimplementasikan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode secara simultan, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap praktik verifikasi DOP sales, serta telaah dokumentasi yang mencakup arsip DOP sales, formulir Permintaan Uang Muka (PUM), Permintaan Pembayaran Langsung (PPL), Pertanggungjawaban Keuangan (PJK) atas UM. Penerapan ketiga teknik tersebut secara bersamaan merupakan bentuk triangulasi metode yang bertujuan untuk memperkuat

kredibilitas serta validitas data. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengacu

pada model analisis interaktif yang mencakup tiga tahapan berkelanjutan, yakni kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi simpulan (Miles et al., 2014). Evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan kerangka COSO sebagai instrumen analisis, khususnya pada komponen aktivitas pengendalian, sehingga hasil kajian dapat dinilai secara terstruktur berdasarkan standar yang diakui secara global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Proses Verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sepanjang Kerja Praktik (KP) di *Unit Accounting & Finance* PT Semen Gresik Pabrik Rembang, mekanisme pembayaran kepada unit kerja sales & marketing dilakukan melalui Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) sales. DOP Sales berfungsi sebagai dokumen administratif yang menjadi dasar pengajuan sekaligus realisasi pembayaran kepada unit kerja sales & marketing atas transaksi yang telah terjadi. Sebelum diproses dalam sistem keuangan, setiap DOP Sales wajib melalui tahapan verifikasi internal untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan administratif dan ketentuan perusahaan.

Di PT Semen Gresik Pabrik Rembang, DOP terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan mekanisme pencairan. Pertama, Permintaan Pembayaran Langsung (PPL), diperuntukan untuk permintaan pembayaran langsung tanpa melalui jalur uang muka (UM), yang digunakan untuk reimburse atas pengeluaran yang telah terjadi atau pembayaran langsung kepada unit kerja sales & marketing. Kedua, Permintaan Uang Muka (PUM), yaitu permintaan uang muka yang sebelumnya dicairkan untuk membiayai kegiatan operasional. Ketiga, Pertanggungjawaban Keuangan (PJK) atas UM adalah digunakan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diminta diawal, dengan memberikan rincian transaksi secara detail berdasarkan kegiatan sesuai dengan permintaan UM. Pembagian ini sejalan dengan konsep siklus pengeluaran kas menurut Romney (2012) di mana setiap jalur pengeluaran memerlukan verifikasi dan otorisasi berbeda, namun tetap menuntut kelengkapan dokumen pendukung sebelum pembayaran diproses.

Dalam mekanisme pengelolaan Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) sales di PT Semen Gresik Pabrik Rembang, setiap penggunaan dana operasional yang berasal dari uang muka (UM) wajib dipertanggungjawabkan melalui dokumen Pertanggungjawaban Keuangan (PJK). Proses PJK berfungsi untuk mengevaluasi kesesuaian antara jumlah dana yang telah dicairkan dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan verifikasi internal, hasil pertanggungjawaban tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kondisi utama, yaitu lebih bayar, kurang bayar, dan impas.

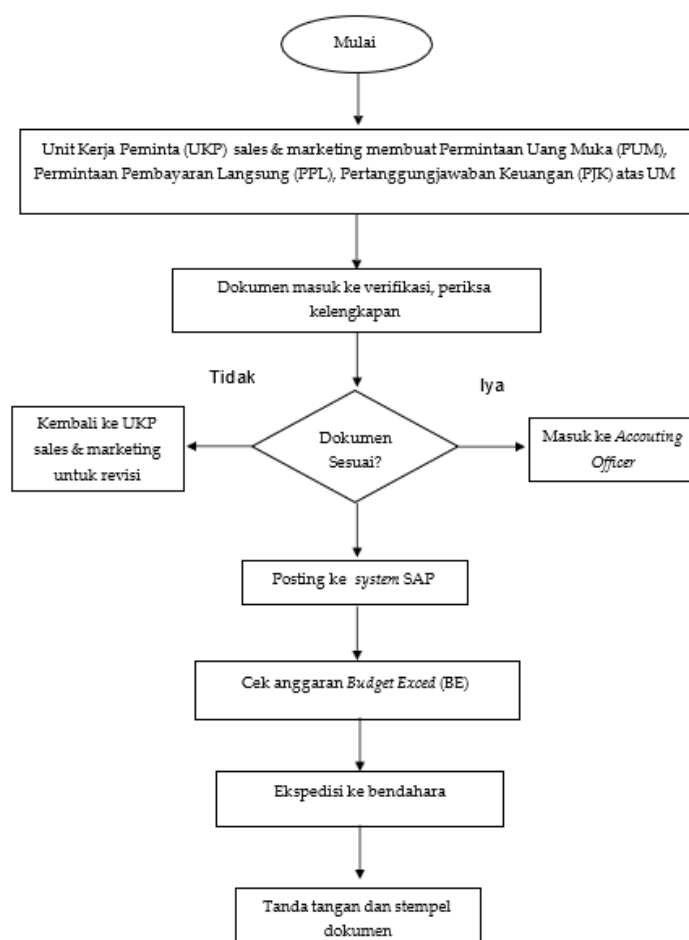
Kondisi lebih bayar terjadi ketika dana yang dicairkan melalui uang muka lebih besar dibandingkan dengan realisasi biaya kegiatan. Sebagai contoh, apabila suatu UKP sales & marketing mengajukan uang muka sebesar Rp10.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan operasional, namun setelah kegiatan selesai total biaya yang terealisasi hanya sebesar Rp5.000.000, maka dalam dokumen PJK akan tercatat status lebih bayar. Dalam kondisi ini, unit kerja peminta terkait wajib mengembalikan sisa dana sebesar Rp5.000.000 kepada bagian keuangan perusahaan. Sebaliknya, kondisi kurang bayar terjadi apabila realisasi biaya kegiatan melebihi dana uang muka yang telah diberikan, sehingga perusahaan perlu melakukan pembayaran tambahan kepada UKP sales & marketing atau pihak terkait sesuai dengan selisih kekurangan yang tercatat dalam dokumen PJK.

Selain kedua kondisi tersebut, terdapat pula kondisi impas, yaitu ketika jumlah dana yang dicairkan melalui uang muka sama dengan total realisasi biaya kegiatan. Dalam situasi ini tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan dana karena nilai pengeluaran operasional sepenuhnya sesuai dengan jumlah uang muka yang telah diberikan sebelumnya. Melalui proses verifikasi PJK, bagian

verifikasi internal dapat memastikan kesesuaian realisasi biaya serta melakukan proses clearing dalam sistem keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, proses verifikasi memiliki fungsi penting dalam melakukan clearing terhadap transaksi uang muka agar dianggap close atau terselesaikan dalam *system* SAP. Hal ini penting karena perusahaan menerapkan ketentuan administratif bahwa setiap fungsi atau UKP sales & marketing hanya diperkenankan memiliki maksimal dua transaksi uang muka DOP yang masih terbuka dalam sistem. Apabila suatu UKP sales & marketing membutuhkan pengajuan uang muka tambahan, maka salah satu dari transaksi uang muka yang masih terbuka tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui proses PJK. Dengan demikian, verifikasi dokumen tidak hanya berfungsi untuk memastikan akurasi administrasi pembayaran, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban pengelolaan transaksi uang muka dalam sistem keuangan perusahaan

Proses verifikasi dilaksanakan oleh bagian verifikasi internal dengan menilai sejumlah aspek penting, antara lain kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian nilai transaksi antara rekap pembayaran dan nota asli, keabsahan faktur pajak, serta konsistensi informasi administratif seperti nomor invoice, judul dokumen, dan tanda tangan otorisasi. Tahapan ini merupakan bagian dari aktivitas pengendalian dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan menjamin kesesuaian transaksi dengan prosedur yang berlaku sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pembayaran (Hanifah et al., 2023). Melalui mekanisme verifikasi tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap transaksi pembayaran telah melewati pemeriksaan administratif yang memadai, sehingga mendukung akurasi dan ketepatan pembayaran kepada UKP sales & marketing



Gambar 1.

Flowchart Proses Verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales di PT Semen Gresik Pabrik Rembang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan kerja praktik, alur verifikasi DOP Sales diawali dari unit kerja peminta (UKP) sales & marketing yang menyusun dokumen tagihan atau permintaan pembayaran. Pengajuan tersebut dapat berupa Permintaan Uang Muka (PUM), Permintaan Pembayaran Langsung (PPL), Pertanggungjawaban Keuangan (PJK) atas (UM), yang telah direalisasikan. Dokumen yang telah disusun kemudian diajukan kepada bagian verifikasi internal untuk diproses lebih lanjut.

Pada tahap awal, bagian verifikasi menerima dokumen secara manual dalam bentuk berkas fisik. Verifikator kemudian mencatat tanggal penerimaan dokumen serta memberikan tanda tangan sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima dan masuk ke dalam proses verifikasi. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan, termasuk pengecekan dokumen pendukung, kesesuaian nominal transaksi, serta ketepatan informasi administratif. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen, berkas tersebut akan dikembalikan kepada UKP sales & marketing untuk dilakukan revisi. Sebaliknya, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, dokumen tersebut diteruskan kepada *Accounting Officer* untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan serta pemberian tanda tangan sebagai bentuk otorisasi.

Setelah memperoleh persetujuan dari *Accounting Officer*, dokumen kembali diproses oleh bagian verifikasi untuk dilakukan pencatatan transaksi melalui sistem SAP. Pada tahap ini, verifikator juga melakukan pengecekan terhadap ketersediaan anggaran. Apabila dalam proses tersebut ditemukan kondisi Budget Exceed (BE), maka bagian verifikasi akan berkoordinasi dengan pihak budgeting untuk melakukan pengecekan atau penyesuaian anggaran agar transaksi dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dokumen yang telah diposting dalam sistem akan dikirimkan melalui proses ekspedisi kepada bendahara untuk tahap pemrosesan pembayaran. Pada tahap ini dilakukan pemberian tanda tangan serta stempel yang disesuaikan dengan tanggal posting sebagai bentuk validasi administrasi. Setelah seluruh proses tersebut selesai, dokumen diserahkan kepada bendahara sebagai dasar pelaksanaan pembayaran kepada pihak terkait. Dengan demikian, seluruh tahapan verifikasi DOP Sales berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan setiap transaksi pembayaran telah melalui proses pemeriksaan administratif dan otorisasi yang memadai sebelum direalisasikan.

Temuan Permasalahan dalam Verifikasi DOP Sales

Berdasarkan catatan hasil verifikasi dokumen selama periode Januari hingga Maret, jumlah Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) sales yang diajukan untuk diproses mencapai 270 dokumen. Dari keseluruhan dokumen tersebut, sebanyak 41 di antaranya harus mengalami perbaikan akibat ditemukannya ketidaksesuaian administratif pada tahap verifikasi. Apabila dikalkulasi dalam bentuk persentase, tingkat revisi dokumen tercatat sekitar 15,2% dari total dokumen yang masuk. Angka tersebut mengindikasikan bahwa hampir satu dari setiap tujuh dokumen yang disampaikan oleh UKP sales & marketing memerlukan penyempurnaan sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pemrosesan dalam sistem pembayaran perusahaan.

Tabel 1.

Rekapitulasi Verifikasi Dokumen DOP Sales Januari-Maret 2026

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Total dokumen DOP Sales yang masuk	270
2.	Dokumen yang direvisi	41
3.	Persentase revisi dokumen	15,2%

4.	Waktu rata-rata revisi	1-2 minggu
----	------------------------	------------

Sumber: Data verifikasi internal PT Semen Gresik Pabrik Rembang (2026)

Besaran persentase revisi dokumen tersebut mengindikasikan bahwa masih dijumpai ketidaksesuaian administratif pada dokumen yang diserahkan oleh UKP sales & marketing. Kondisi ini mengakibatkan dokumen bersangkutan harus dikembalikan kepada pihak UKP sales & marketing untuk dilakukan penyempurnaan sebelum dapat diproses lebih lanjut dalam sistem pembayaran perusahaan.

Analisis Penyebab Revisi Dokumen (Root Cause Analysis)

Hasil identifikasi terhadap dokumen yang mengalami revisi menunjukkan adanya beberapa jenis kesalahan yang muncul dalam verifikasi DOP Sales. Kesalahan utama berupa ketidaksesuaian nilai antara rekap pembayaran dengan nota asli atau perbedaan nominal pajak dalam dokumen transaksi. Selain itu, ditemukan juga dokumen yang tidak dilengkapi dengan bukti pendukung sebagaimana dipersyaratkan, misalnya tidak adanya salinan rekap *Virtual Account* (VA), dan belum ada tanda tangan di lembar rekap. Selain itu penataan dokumen juga tidak urut. Ketidaklengkapan tersebut menghambat proses verifikasi secara menyeluruh karena dokumen pendukung merupakan syarat administratif dalam pembayaran.

Kesalahan lain bersifat administratif, seperti kekeliruan penulisan judul dokumen, pencantuman nomor *invoice* yang tidak tepat, serta ketidaksesuaian penempatan tanda tangan bagian *accounting*. Walaupun bersifat administratif, revisi tetap diperlukan agar dokumen memenuhi standar administrasi perusahaan. Kondisi ini mengharuskan verifikasi menghentikan proses dan mengembalikan dokumen kepada UKP sales & marketing untuk dilakukan koreksi. Selain itu revisi tidak hanya bersumber dari kesalahan administratif teknis, tetapi juga memperlihatkan pola kesalahan berulang, seperti ketidaksesuaian nominal, ketidaklengkapan dokumen pendukung, dan kesalahan penulisan informasi administratif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses koreksi yang dilakukan UKP sales & marketing belum menghasilkan pembelajaran administratif yang memadai, sehingga kesalahan serupa kembali muncul dalam pengajuan berikutnya. Dalam perspektif COSO, hal ini mencerminkan lemahnya *control activities* pada pihak eksternal, di mana standar prosedur yang telah ditetapkan perusahaan belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh UKP (Herlambang, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan verifikasi internal ada beberapa faktor revisi dokumen DOP atau yang memicu kesalahan berulang antara lain kurang ketelitian pihak UKP sales & marketing, terlalu terburu buru, dan terjadi kelalaian oleh pihak UKP sales & marketing, pergantian personel administrasi yang tidak selalu memiliki pemahaman memadai mengenai standar dokumen, serta belum optimalnya pemeriksaan internal sebelum dokumen diajukan.

Sebelumnya sebagian UKP sales & marketing berada dalam lingkup operasional Semen Indonesia, sedangkan saat ini proses administrasi pembayaran mengikuti pedoman verifikasi yang berlaku di PT Semen Gresik. Perubahan tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan administrasi dokumen. Dalam beberapa kasus, pihak UKP sales & marketing masih mengacu pada kebiasaan sebelumnya yang memperbolehkan penggunaan bukti transaksi dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*). Sementara itu, berdasarkan pedoman verifikasi yang berlaku di PT Semen Gresik, dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar pembayaran harus berupa bukti transaksi asli. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan dokumen yang diajukan sering kali tidak memenuhi standar administrasi yang telah ditetapkan sehingga memerlukan proses revisi.

Selain faktor perbedaan standar administrasi, kendala jarak dan komunikasi juga turut memengaruhi proses revisi dokumen. UKP sales & marketing berada pada lokasi operasional yang relatif jauh dari bagian verifikasi, sehingga proses koordinasi dan perbaikan dokumen membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi ini menyebabkan proses klarifikasi terhadap kesalahan dokumen tidak

selalu dapat dilakukan secara langsung, sehingga komunikasi terkait perbaikan dokumen sering kali dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Faktor lain yang turut memperlambat proses verifikasi adalah kurangnya penandaan atau informasi pada dokumen yang telah direvisi ketika dikirimkan kembali kepada bagian verifikasi. Dalam beberapa kasus, dokumen yang telah diperbaiki oleh UKP sales & marketing tidak disertai keterangan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil revisi dari dokumen sebelumnya. Akibatnya, bagian verifikasi harus melakukan proses identifikasi ulang dengan mencari dan mengelompokkan dokumen secara manual sebelum dapat melanjutkan proses pemeriksaan. Kondisi ini menambah beban kerja verifikator sekaligus memperpanjang waktu yang dibutuhkan dalam proses verifikasi dokumen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa revisi dokumen tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor koordinasi administratif, perbedaan pemahaman terhadap prosedur, serta efektivitas komunikasi antar UKP sales & marketing. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengendalian internal dalam proses verifikasi tidak hanya bergantung pada ketelitian verifikator, tetapi juga memerlukan peningkatan pemahaman prosedur serta koordinasi yang lebih baik antara UKP sales & marketing peminta dan bagian verifikasi.

Meskipun perusahaan telah melakukan sosialisasi prosedur dan menyediakan checklist, mekanisme pengendalian administratif di pihak UKP sales & marketing masih kurang efektif. Dalam kerangka COSO, kondisi ini menunjukkan adanya celah pada komponen *information & communication* serta *monitoring activities*, karena informasi mengenai standar dokumen belum sepenuhnya tersampaikan dan pengawasan internal UKP belum berjalan optimal (COSO, 2013). Dengan demikian, kualitas dokumentasi transaksi pada tahap awal pengajuan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengendalian administratif yang diterapkan UKP.

Analisis Efektivitas Pengendalian Internal

Proses verifikasi dokumen DOP Sales yang dilaksanakan oleh bagian verifikasi internal merupakan salah satu aktivitas pengendalian dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah memastikan setiap transaksi memenuhi standar administrasi yang berlaku serta didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dokumen di PT Semen Gresik Pabrik Rembang berfungsi sebagai alat deteksi kesalahan sebelum pembayaran diproses. Hal ini tercermin dari adanya pemeriksaan sistematis terhadap kesesuaian nominal transaksi, kelengkapan dokumen pendukung, dan validitas dokumen perpajakan.

Namun, tingkat revisi dokumen yang mencapai sekitar 15,2% mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian internal pada tahap verifikasi masih dominan bersifat detektif, yakni menemukan kesalahan setelah dokumen diajukan oleh UKP sales & marketing. Pengendalian internal yang efektif seharusnya tidak hanya berperan sebagai mekanisme deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang mampu meminimalkan kesalahan sejak tahap awal penyusunan dokumen. Tsalisa (2024) menegaskan bahwa efektivitas pengendalian internal yang optimal dapat meningkatkan akurasi transaksi keuangan sekaligus menurunkan frekuensi kesalahan administratif dalam proses keuangan organisasi.

Dampak Revisi Dokumen terhadap Ketepatan Pembayaran

Revisi dokumen dalam proses verifikasi Dokumen Operasional Pembayaran (DOP) Sales memiliki implikasi terhadap kelancaran proses pembayaran, kepatuhan perpajakan, serta ketepatan pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi perusahaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan verifikator internal pada Unit Accounting & Finance PT Semen Gresik Pabrik Rembang, revisi dokumen yang terjadi akibat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan berkas menyebabkan dokumen harus dikembalikan kepada UKP sales & marketing untuk dilakukan perbaikan. Proses tersebut

mengakibatkan dokumen yang seharusnya dapat segera diproses dalam sistem keuangan menjadi tertunda, sehingga memperpanjang siklus penyelesaian pembayaran kepada pihak terkait. Dengan demikian, semakin sering dokumen mengalami revisi, maka semakin besar pula potensi keterlambatan dalam proses realisasi pembayaran.

Selain berdampak pada ketepatan waktu pembayaran, revisi dokumen juga memiliki implikasi terhadap aspek kepatuhan perpajakan. Dalam beberapa kasus, revisi berkaitan dengan kesalahan atau keterlambatan dalam pengajuan faktur pajak. Apabila faktur pajak telah melewati batas waktu pelaporan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif berupa denda. Namun demikian, apabila dokumen yang terlambat masih berada pada tahap pengajuan di UKP sales & marketing dan belum masuk ke tahap verifikasi, maka tanggung jawab atas keterlambatan tersebut berada pada pihak UKP sales & marketing. Dalam praktiknya, bagian verifikasi bersama pihak pajak perusahaan biasanya akan meminta unit kerja terkait untuk membuat surat korespondensi yang menyatakan kesediaan menanggung denda pajak tersebut, karena dokumen yang terlambat tidak dapat diproses untuk pengkreditan pajak dalam sistem.

Dari perspektif akuntansi, keterlambatan dokumen akibat revisi juga berpotensi memengaruhi ketepatan periode pencatatan transaksi keuangan. Dalam sistem akuntansi perusahaan, pencatatan transaksi baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi selesai dan dokumen diposting ke dalam sistem SAP. Apabila proses verifikasi tertunda akibat revisi dokumen, maka pencatatan transaksi juga akan ikut tertunda hingga dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. Kondisi ini dapat memengaruhi prinsip cut-off dalam akuntansi, yaitu prinsip yang mengharuskan setiap transaksi dicatat pada periode terjadinya agar laporan keuangan dapat merefleksikan kondisi keuangan secara akurat.

Untuk menjaga ketertiban administrasi dan ketepatan periode pencatatan, PT Semen Gresik Pabrik Rembang menerapkan ketentuan mengenai batas akhir penerimaan dokumen oleh bagian verifikasi. Dokumen pembayaran harus diserahkan oleh unit kerja peminta sebelum pergantian bulan atau paling lambat pada tanggal dua bulan berikutnya. Ketentuan ini diberlakukan karena pada tanggal tiga bagian akuntansi telah melakukan proses penutupan buku (closing) periode akuntansi. Oleh karena itu, dokumen yang belum diserahkan atau masih dalam proses revisi hingga melewati batas waktu tersebut tidak dapat diproses pada periode berjalan dan harus menunggu periode berikutnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan periode akuntansi yang berlaku.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dokumen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif dalam sistem pengendalian internal perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Ketepatan dan kelengkapan dokumen pada tahap awal pengajuan menjadi faktor penting yang memengaruhi kelancaran proses pembayaran, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta ketepatan waktu pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi perusahaan.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Perbaikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi dokumen DOP Sales di PT Semen Gresik Pabrik Rembang pada dasarnya telah berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi kesalahan administratif sebelum proses pembayaran direalisasikan. Proses verifikasi yang dilakukan oleh bagian verifikasi internal terbukti mampu mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian dokumen, seperti perbedaan nominal transaksi, ketidaklengkapan dokumen pendukung, maupun kesalahan administratif lainnya. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian kesalahan dokumen bersifat berulang meskipun perusahaan telah melakukan sosialisasi prosedur administrasi serta menyediakan checklist dokumen sebagai pedoman pengajuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan

dengan ketersediaan prosedur formal, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi implementasi serta tingkat pemahaman administratif pada pihak UKP sales & marketing.

Berdasarkan hasil analisis penyebab revisi dokumen, salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya kesalahan berulang adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai standar administrasi dokumen antara UKP sales & marketing dan bagian verifikasi. Perubahan sistem administrasi dari lingkup Semen Indonesia ke pedoman yang berlaku di PT Semen Gresik menyebabkan sebagian UKP sales & marketing masih menggunakan praktik administrasi yang berbeda, misalnya penggunaan bukti transaksi dalam bentuk tangkapan layar yang sebenarnya tidak diperkenankan dalam pedoman verifikasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan penguatan sosialisasi prosedur administrasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan kepada unit kerja terkait. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga dapat difokuskan pada UKP sales & marketing yang memiliki tingkat revisi dokumen relatif tinggi sehingga pemahaman terhadap standar administrasi perusahaan dapat lebih merata.

Selain itu, perusahaan juga dapat memperkuat kontrol administratif pada tahap awal pengajuan dokumen dengan mengembangkan mekanisme evaluasi berbasis data revisi dokumen. Misalnya melalui pencatatan riwayat revisi atau dokumentasi jenis kesalahan yang sering terjadi pada setiap UKP sales & marketing. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi administratif sekaligus sebagai umpan balik yang sistematis bagi UKP sales & marketing agar dapat memahami pola kesalahan yang terjadi dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen pada pengajuan berikutnya. Mekanisme evaluasi semacam ini dapat membantu menurunkan frekuensi revisi dokumen serta meningkatkan efektivitas proses verifikasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kendala komunikasi dan koordinasi antar UKP sales & marketing turut memengaruhi proses perbaikan dokumen. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan pemanfaatan media komunikasi administratif yang lebih terintegrasi, misalnya melalui penyampaian panduan administrasi dalam bentuk digital yang mudah diakses atau melalui kanal komunikasi resmi yang dapat memfasilitasi klarifikasi dokumen secara lebih cepat. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman administratif serta mempercepat proses perbaikan dokumen ketika terjadi revisi.

Rekomendasi lain yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan standarisasi format dokumen pembayaran yang lebih terstruktur, misalnya melalui penggunaan template dokumen atau formulir digital dengan panduan pengisian yang jelas. Standarisasi ini dapat membantu meminimalkan kesalahan administratif seperti kesalahan penulisan nomor invoice, judul dokumen, maupun kelengkapan dokumen pendukung. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa standarisasi dokumentasi transaksi mampu meningkatkan konsistensi administrasi serta mendukung efektivitas pengendalian internal dalam proses keuangan perusahaan (Hanifah et al., 2023).

Secara keseluruhan, implementasi berbagai langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat menurunkan frekuensi revisi dokumen, meningkatkan efisiensi proses verifikasi, serta mendukung ketepatan waktu pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Dengan demikian, fungsi verifikasi dokumen tidak hanya berperan sebagai mekanisme deteksi kesalahan administratif, tetapi juga sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal serta keandalan informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dokumen DOP Sales di PT Semen Gresik Pabrik Rembang telah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mampu mendeteksi kesalahan sebelum pembayaran dilakukan. Namun, sebagian kesalahan yang ditemukan bersifat berulang meskipun perusahaan telah melakukan sosialisasi prosedur administrasi dan menyediakan checklist dokumen. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tidak hanya terkait ketersediaan

prosedur, tetapi juga konsistensi implementasi administrasi pada pihak UKP sales & marketing.

Salah satu langkah perbaikan yang dapat dilakukan adalah memperkuat kontrol administratif pada tahap awal pengajuan dokumen UKP sales & marketing. Perusahaan dapat mengembangkan sistem evaluasi dengan memberikan umpan balik terstruktur, misalnya melalui pencatatan riwayat revisi atau dokumentasi jenis kesalahan yang sering terjadi. Mekanisme ini akan membantu UKP sales & marketing memahami pola kesalahan sehingga kualitas administrasi dokumen dapat ditingkatkan pada pengajuan berikutnya. Selain itu, penerapan standarisasi format dokumen pembayaran yang lebih terintegrasi juga perlu dipertimbangkan. Penggunaan template atau formulir digital dengan panduan pengisian yang jelas dapat mengurangi kesalahan administratif seperti penulisan nomor invoice, judul dokumen, maupun kelengkapan dokumen pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. V., & Afiqoh, N. W. (2025). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan efektivitas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 4(2), 22–35. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v4i2.10876>
- Arista, D., Ziah, S. U., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Economina*, 2(7), 1719–1729. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.668>
- Arlinda, L., & Julianto, I. P. (2025). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian internal terhadap aset tetap pada PT PLN (Persero) ULP Singaraja. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(2), 423–436. <https://doi.org/10.23887/jap.v16i02.96011>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Dewi, A. K., Sibarani, B. K., Saputra, E., Norazlina, Susanti, S., Syafira, Y., & Munakalla, Y. (2025). Strategi efektif pengendalian internal dalam keamanan sistem informasi akuntansi untuk perlindungan data keuangan. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 138–148. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.838>
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: Pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. *Jurnal Economina*, 2(6), 1318–1330. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Haqqe, I. S., & Fatah, D. A. (2025). Analisis prosedur verifikasi dokumen klaim wanprestasi dan meninggal dunia PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 6(1).
- Hasan, Suriyanti, & Imaduddin. (2024). Pengaruh Manajemen Hubungan Pemasok Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(4), 1–7. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15539>
- Herlambang, W. (2023). *Analisis implementasi sistem pengendalian internal berdasarkan COSO framework pada UD Tomas Pare Kediri* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (studi kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1805–1830. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.628>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Nathasya, S. (2022). *Sistem dan prosedur verifikasi dokumen tagihan pembayaran terhadap vendor pada PT Semen Padang* (Laporan tugas akhir, Universitas Andalas), hlm. 1–6.
- Ningsih, D. R. U., & Afiah, N. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembayaran Klaim Pada Bpjs Kesehatan Cabang Makassar. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(3), 1–11.

- <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/ikmt>
- Nurhidayanti, M. (2025). Evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 23–30.
- Otoo, F. N. K., Kaur, M., & Rather, N. A. (2023). Evaluating The Impact Of Internal Control Systems On Organizational Effectiveness. *Lbs Journal Of Management & Research*, 21(1), 135–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/Lbsjmr-11-2022-0078>
- Rahmawati, T. (2026). Optimalisasi Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/https://publikasi.nexusjournal.com/index.php/jurai>
- Romney, M., Steinbart, P., Mula, J., Mcnamara, R., & Tonkin, T. (2012). Accounting Information Systems Australasian Edition. *Pearson Higher Education Au*.
- Salsabila, N. (2025). Analisis Pengendalian Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Terhadap Keamanan Data Dan Informasi Akuntansi. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(4), 1004–1012. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/Wpdj6n24>
- Sari, N. P., & Putri, S. Y. (2025). Analisis Efisiensi Pembayaran Tagihan Vendor Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan: Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan Bumh Di Indonesia. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 8381–8386. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.3259>
- Sukmana, O., Machmud, M., Basri, L., Khoirurrosyidin, K., Sari, A. F., Jumui, J., Saputro, D., Remtulla, A. N., Walikrom, A. A. R., & Arusani, A. (2025). Metode penelitian kualitatif: Suatu pengantar konseptual dan praktis. *Star Digital Publishing*.
- Tsalisa, R. (2024). Sistem informasi akuntansi, budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan dengan mediasi efektivitas pengendalian internal. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3(2), 61–75. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i2.8962>
- Wijayanto, K., & Ghazali, I. (2023). Timeliness of financial reporting factors in Indonesian manufacturing companies (A case study of the period 2017–2021). *Proceedings of the International Conference on Economics and Business Studies (ICOEBS-22-2)*, 1088–1097. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-204-0_89
- Wirdiansyah, R. D., & Munandar, A. (2022). The Effect Of Application Of Payroll Accounting Information System In Increasing The Effectiveness Of Company's Internal Control (Literature Study). *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 5(1), 151–161.
- Zahara, I., Mubarroq, Z., & Syah, M. E. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pengeluaran Kas: Cso Icf 2013: Studi Pada Perusahaan Konsultan Pertambangan Migas Di Yogyakarta. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*, 188–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/Ebisma.V5i1.1448>
- Zahrani, S. S., & Yuhertiana, I. (2025). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt Xyz. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(10), 142–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.V3i10.6737>